

Laporan baru menunjukkan bahwa anggota parlemen terus berada dalam bahaya di Asia Tenggara di tengah tampilan luar yang demokratis

MANILA – Di banyak negara di Asia Tenggara – terutama di Myanmar dan juga negara lain – anggota parlemen dan mantan anggota parlemen terus mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, menurut laporan tahunan terbaru Parliamentarians At Risk dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), diluncurkan hari ini di Manila, Filipina.

“Kemampuan anggota parlemen untuk menjalankan mandatnya dengan aman dan berbicara serta bertindak atas nama konstituennya merupakan cara penting untuk mengendalikan kekuasaan dan memperkuat demokrasi. Saat ini, suara kolektif kita akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa serangan terhadap salah satu anggota parlemen adalah serangan terhadap institusi itu sendiri. Kami akan berdiri dalam solidaritas dengan mereka, memastikan bahwa suara mereka yang dibungkam tidak dilupakan, dan menyerukan diakhirinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar mereka,” kata Ketua APHR dan anggota DPR RI Mercy Barends.

Pada tahun 2023, anggota parlemen di Asia Tenggara terus menghadapi ancaman dan serangan. Myanmar tetap menjadi negara terburuk dalam hal pemenjaraan anggota parlemen (MP), dengan 74 anggota parlemen ditahan di wilayah tersebut.

Sebanyak 73 anggota parlemen berasal dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan hanya satu yang berasal dari partai lain, Partai Mon Unity. Ini menunjukkan adanya tujuan politik dari penangkapan tersebut, karena anggota parlemen dari NLD – yang memenangkan pemilu tahun 2020 – yang merupakan target utama. Banyak anggota parlemen yang digulingkan masih terus bersembunyi, baik di dalam maupun luar Myanmar, karena jika ditemukan oleh junta militer mereka berisiko ditahan, disiksa, dan bahkan dibunuh. Beberapa di antaranya menyaksikan anggota keluarga mereka dilecehkan dan harta benda mereka disita oleh militer.

Namun, Myanmar bukan satu-satunya tempat terjadinya serangan terhadap anggota parlemen. Pemerintah di banyak negara Asia Tenggara terus melakukan pelecehan hukum khususnya terhadap anggota parlemen oposisi. Di Filipina, misalnya, meskipun Anggota APHR dan mantan senator Leila de Lima akhirnya dibebaskan dengan jaminan setelah hampir tujuh tahun ditahan secara tidak adil pada bulan November 2023, ia masih menunggu persidangan atas kasus narkoba terakhir yang menjeratnya.

“Kasus saya hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang terus terjadi di wilayah kami. Hal ini mencerminkan bagaimana Asia Tenggara, sebuah kawasan yang memiliki potensi besar,

menyaksikan tren otoriterisme yang mengkhawatirkan, di mana tokoh-tokoh oposisi dibungkam, suara-suara yang berbeda pendapat dibungkam, dan pada akhirnya kebebasan fundamental dirampas,” kata de Lima. “Hal ini dilakukan melalui serangkaian taktik, seperti terus menggunakan undang-undang yang kejam untuk mengekang kebebasan berpendapat, hukuman penjara, intimidasi, dan kekerasan.”

Anggota parlemen oposisi juga terus menghadapi pelecehan di Filipina, khususnya melalui penggunaan “tanda merah” yang berbahaya, yaitu ketika aktivis politik, jurnalis, dan pihak lain dituduh sebagai komunis. Mereka yang “ditandai merah” sering kali diserang secara fisik.

Dua negara – Thailand dan Kamboja – menyelenggarakan pemilu pada tahun 2023, namun warga negara pada kedua negara tersebut tidak dapat memilih pemimpin yang mereka inginkan, baik karena intimidasi fisik dan hukum terhadap anggota parlemen, atau melalui aparat negara non-demokratis yang mencegah kehendak rakyat untuk terpenuhi selama pemilu.

Di Kamboja, pemilu tahun 2023 adalah sebuah lelucon yang hanya memperkuat cengkeraman kekuasaan yang dipegang oleh Hun Sen – orang kuat otokratis yang telah memerintah sejak tahun 1985 – dan sekutu-sekutunya. Hanya tiga partai yang berpartisipasi dalam pemilu tersebut, dan partai oposisi terbesar di negara tersebut, Partai Cahaya Lilin, dilarang berpartisipasi karena alasan administratif yang meragukan beberapa minggu sebelum pemilu berlangsung. Dalam minggu-minggu menjelang pemilu, rezim Hun Sen juga melancarkan serangan tanpa henti terhadap pembela hak asasi manusia dan partai oposisi.

Sementara di Thailand, Partai Move Forward dicegah membentuk pemerintahan oleh senator yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, meski telah memperoleh jumlah suara terbanyak pada pemilu Mei 2023. Selain dicegah untuk menjadi perdana menteri, judicial harassment juga dilakukan terhadap pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat. Taktik ini merupakan bagian dari pola yang digunakan terhadap politisi progresif dalam beberapa tahun terakhir – terutama anggota Future Forward, pendahulu Move Forward.

Di Malaysia, ketika pemerintahan yang baru menjanjikan reformasi, judicial harassment terus terjadi, termasuk melalui undang-undang yang kejam seperti Undang-Undang Penghasutan (Sedition Act), yang berulang kali diminta oleh APHR untuk dicabut. Tindakan tersebut – yang sebelumnya telah digunakan terhadap anggota parlemen oposisi – dapat dikenakan hukuman tiga hingga tujuh tahun penjara karena pelanggaran yang tidak jelas, termasuk tindakan dengan “kecenderungan hasutan” terhadap pemerintah.



“Parlemen – dan juga anggota parlemen – memainkan peran penting dalam memberikan pengawasan terhadap pemerintah dalam demokrasi yang berfungsi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi anggota parlemen untuk menjalankan mandat mereka tanpa takut akan pembalasan dari pemerintah,” kata Anggota Board APHR dan anggota parlemen Malaysia Wong Chen. “Mengingat berlanjutnya risiko yang dihadapi oleh anggota parlemen di kawasan, APHR terus menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya kolektif dalam melindungi anggota parlemen yang berisiko di kawasan.”